

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2016-2017)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

NOOR FARIEDA AWWALIYAH

NIM. 1505046036

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Noor Farieda Awwaliyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah saudara :

Nama : Noor Farieda Awwaliyah

NIM : 1505046036

Judul : **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2017)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 5 Maret 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ranie Agrivanto, S.Pd.,
M.Si., Akt., CA., CPAI.

NIP. 19800128 200801 1 010


Dessy Noor Farida, S.E., M.Si.,
Akt., CA.

NIP. 19791222 201503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : **Noor Farieda Awwaliyah**
NIM : 1505046036
Judul : **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2017)**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude, pada tanggal:

29 April 2019

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Akuntansi Syariah Jurusan Akuntansi Syariah tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 7 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Dr. Ratno Agrivanto, CA., CPA.
NIP. 198000128 200801 1 010

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002



Drs. H. Hasvim Syarbani, M.M.
NIP. 19570913 198203 1 002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ratno Agrivanto, CA., CPA.
NIP. 19800128 200801 1 010

Dessy Noor Farida, M.Si., AK CA.
NIP. 19791222 201503 2 001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Noor Farieda Awwaliyah

NIM : 1505046036

Program Studi : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2017)

Semarang, 5 Maret 2019

Deklarator



Noor Farieda Awwaliyah

NIM. 1505046036

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ^{قَدْ}

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*

(QS. Ar-Ra'd : 11)

**“Hidup ini sudah sulit, jadi jangan dipersulit. Usahakanlah
menyederhanakannya”**

- Monica Verginia -

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa karya yang sederhana ini untuk:

Abah dan ibuku tercinta,
Yang selalu mendoakan dan menuntun disetiap langkahku

Kedua kakak dan kakak iparku tersayang,
Yang selalu memberikan dukungan dan menghiburku

Special person, Satriaji Nugroho
Yang telah menemani dan selalu memberikan semangat

Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN), baik anggota, pengurus,
senior maupun alumni

Yang telah memberikan pengalaman berharga selama berorganisasi
Terkhusus kepada Choirul Anam, S.Pd., yang telah menemani dan mau
direpotkan saat proses pencarian data

Sahabat terkasihku (Ulya, Mita, Zanub, Yukha, Arina, Fitri, Luthfi)
Yang memberikanku semangat dan selalu mendoakan yang terbaik untukku

Teman-teman seperjuangan AKS A,
Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus dan tidak
ternilai harganya

Teman hidup selama 45 hari (KKN Posko 39),
Yang telah memberikan semangat dan memberikan banyak pengalaman

Terimakasih...

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

= a	= z	= q
= b	= s	= k
= t	= sy	= l
= ts	= sh	= m
= j	= dl	= n
= h	= th	= w
= kh	= zh	= h
= d	= ‘	= y
= dz	= gh	
= r	= f	

B. Vokal

= a
= i
= u

C. Diftong

= ay
= aw

D. Syaddah ()

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi tanda tasydid misal = *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf () ditulis dengan *al-...* misalnya = *al-hamidun*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah ()

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the effect of local revenue and intergovernmental revenue on the financial performance of local government. This study used Stewardship Theory. The method used is quantitative research method. The method of data analysis used is multiple linear regression analysis. This study used secondary data. The population in this study is the Regency/City in Central Java consists of 29 regencies and 6 cities. The results showed that first, local revenue had positive effect on financial performance of local government. Second, intergovernmental revenue had positive effect on financial performance of local government. Third, local revenue and intergovernmental revenue together influence on financial performance of local government.

Keyword : *local revenue, intergovernmental revenue, financial performance of local government.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupten/Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Kedua*, dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Ketiga*, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keyword : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, kinerja keuangan pemerintah daerah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2017)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Jenjang Strata 1 (S-1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dan selaku dosen wali yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu.
3. Dr. Ratno Agriyanto, S.Pd., M.Si., Akt., CA., CPAI., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku dosen pembimbing I yang telah sabar dalam memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
4. Dessy Noor Farida, S.E., M.Si., Akt., CA., sebagai dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
5. Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA., selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Teman-teman seperjuangan AKS A yang telah menemani sejak awal perkuliahan sampai saat ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan akuntansi syariah yang telah memberikan motivasi dan pengalaman berharga.

Semoga semua amal baik mereka dicatat oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung didalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 <i>Stewardship Theory</i>	8
2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	9
2.3 Dana Perimbangan.....	14
2.4 Pendapatan Asli Daerah	16
2.5 Penelitian Terdahulu.....	21
2.6 Perumusan Hipotesis	24
2.7 Kerangka Pemikiran Teoritik	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis dan Sumber Data	27

3.2	Populasi	27
3.3	Metode Pengumpulan Data	28
3.4	Variabel Penelitian dan Pengukurannya.....	28
3.4.1	Variabel Independen	28
3.4.2	Variabel Dependen.....	29
3.5	Teknik Analisis Data	30
3.5.1	Statistik Deskriptif	30
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	31
3.5.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	33
3.5.4	Uji Hipotesis	34
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
4.2	Deskripsi Variabel	36
4.2.1	Variabel Independen	36
4.2.2	Variabel Dependen.....	37
4.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	37
4.4	Uji Asumsi Klasik	39
4.5	Uji Regresi Linear Berganda	48
4.6	Uji Hipotesis	49
4.7	Pembahasan Hasil penelitian	51
BAB V	PENUTUP	56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Keterbatasan Penelitian	56
5.3	Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1	Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	27
Tabel 3.2	Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah	30
Tabel 4.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	38
Tabel 4.2	Uji Kolmogorov-Smirnov.....	41
Tabel 4.3	Uji Kolmogorov-Smirnov.....	43
Tabel 4.4	Uji Glejser.....	44
Tabel 4.5	Uji Glejser.....	46
Tabel 4.6	Uji Multikolinieritas	47
Tabel 4.7	Uji Autokorelasi	47
Tabel 4.8	Uji Regresi Linear Berganda.....	48
Tabel 4.9	Uji Koefisien Determinasi	49
Tabel 4.10	Uji F.....	50
Tabel 4.11	Uji t.....	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017	3
Grafik 4.1	Grafik Histogram.....	40
Grafik 4.2	Normal Probability plot	40
Grafik 4.3	Grafik Histogram.....	42
Grafik 4.4	Normal Probability Plot	42
Grafik 4.5	Grafik Scatterplot	44
Grafik 4.6	Grafik Scatterplot	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Teoritik	26
-------------------	--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Target dan Realisasi PAD Tahun 2017	61
Lampiran 2	Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Kemandirian.....	62
Lampiran 3	Persentase PAD dan Dana Perimbangan pada Pendapatan Daerah	67
Lampiran 4	Analisis Statistik Deskriptif.....	72
Lampiran 5	Uji Asumsi Klasik	73
Lampiran 6	Uji Analisis Regresi	79
Lampiran 7	Uji Hipotesis	80
Lampiran 8	Surat Jawaban Izin Penelitian dari Badan Pemeriksa Keuangan.....	81
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup.....	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi bertujuan agar pemerintah daerah dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mengedepankan kemandirian daerah, sehingga akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan.

Era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah melakukan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara.¹ Adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan keuangannya sendiri. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan.² Penerapan akuntabilitas pemerintah sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 58 dan QS. Al-Anfal ayat 27.

Pemerintah Pusat mendelegasikan wewenang kepada Pemerintah Daerah disertai dengan penyerahan tanggungjawab pendanaan. Pendanaan pemerintah

¹ Joko Pramono, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta)", Jurnal STIE AMA Salatiga, Vol. 7, No. 13, 2014, h. 85.

² Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh", Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, 2012, h. 15.

daerah terbagi menjadi dua cara, yaitu memanfaatkan potensi daerah (sumber internal) dan dana transfer dari keuangan pusat-daerah dan antar daerah (sumber eksternal).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan daerah yang berasal dari pengembangan potensi daerah yang ada dan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar PAD, maka kinerja keuangan pemerintah semakin baik karena tingkat kemandirian daerah semakin tinggi.

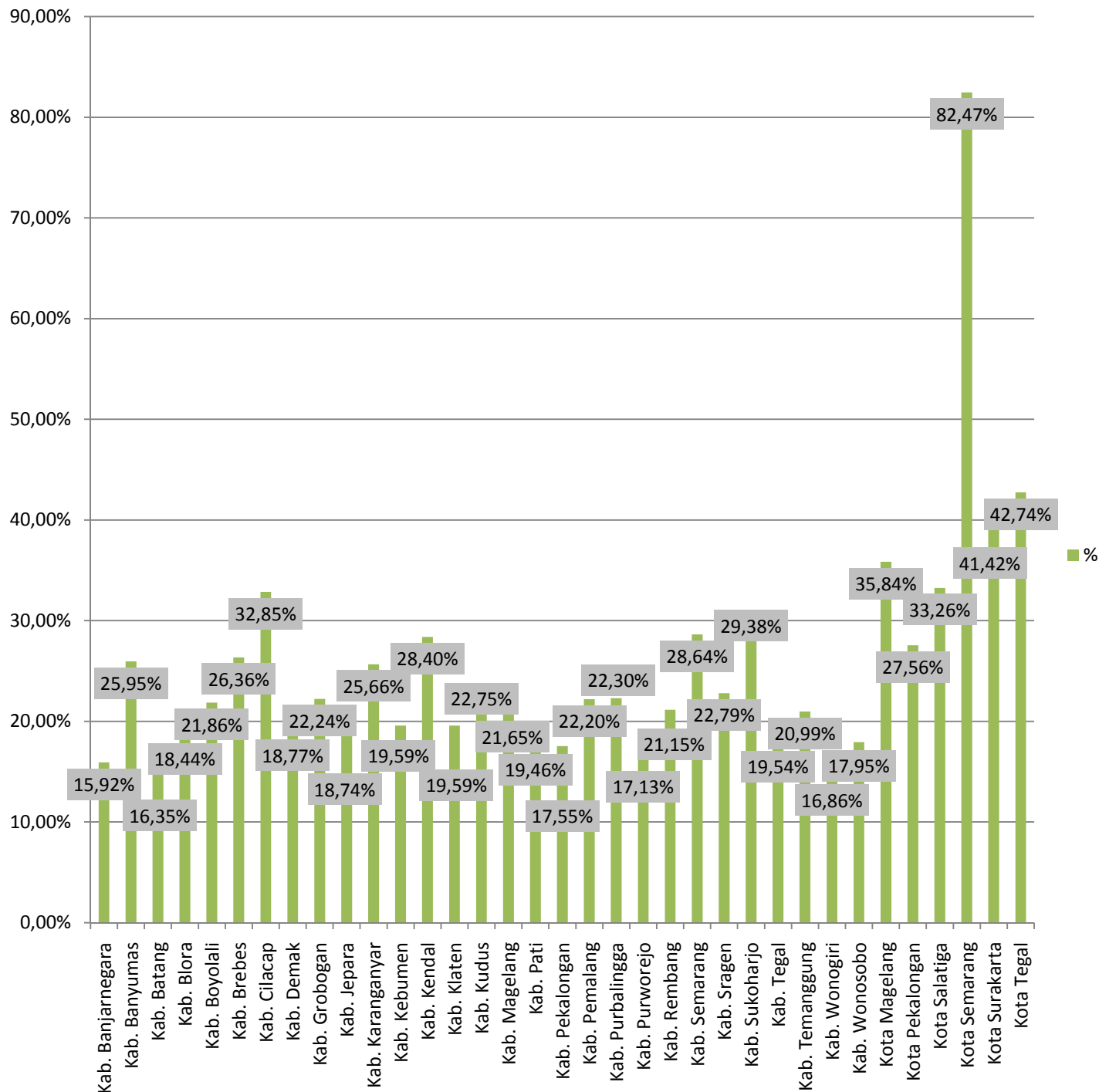
Selain bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), kegiatan pemerintahan juga dibiayai dari dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan wujud nyata desentralisasi dari pusat ke daerah agar tidak terjadi kesenjangan.

Dana perimbangan adalah dana bantuan yang berasal dari pemerintah pusat. Semakin besar dana perimbangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kurang baik karena tingkat kemandiriannya rendah.

Kenyataannya, masih banyak masalah yang terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan keuangannya, yaitu adanya kabupaten yang tidak mencapai target realisasi PAD tahun 2017, yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. (Lampiran 1)

Kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017 masih tergolong rendah, karena pendapatan asli daerah masih tergolong sangat sedikit dibandingkan dengan total bantuan pemerintah pusat/provinsi untuk membiayai kegiatan pemerintahan, hanya ada satu kota yang sudah memiliki kemandirian di atas 50% yaitu Kota Semarang.

Grafik 1.1
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2017



Pada tahun 2017, meskipun Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih ada empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Brebes, Klaten, Rembang dan Kota Tegal. Kabupaten Rembang belum pernah mendapatkan opini WTP dikarenakan faktor pencatatan aset yang belum beres.³

Berdasarkan temuan bukti diatas, jelas terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai belum baik. Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Penelitian seperti ini telah dilakukan oleh Gita Maiyora (2015) menunjukkan bahwa *wealth* (PAD) tidak berpengaruh dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera.⁴ Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin (2012) menunjukkan bahwa PAD dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh.⁵

Penelitian selanjutnya oleh Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016) menunjukkan bahwa kemakmuran (PAD) dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.⁶ Sejalan dengan penelitian Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati, penelitian Mirna Sesotyningtyas (2016) menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.⁷

³ Nurfmrembang, "Tak Hanya Adipura, Tahun 2018 Rembang Juga Incar WTP", <https://www.nurfmrembang.com/berita/tak-hanya-adipura-tahun-2018-rembang>, diakses 22 September 2018.

⁴ Gita Maiyora, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)", Jom FEKON, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 13-14.

⁵ Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh", ..., h. 27.

⁶ Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati, "Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2016, h. 1176-1177.

⁷ Mirna Sesotyningtyas, "Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1, No. 1, 2012, h. 5.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting karena masih banyak permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pengukuran kinerja ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi untuk pemerintah daerah dan dapat digunakan sebagai informasi publik kepada masyarakat. Penelitian ini mengacu pada penelitian Gita Maiyora (2015) dengan beberapa perbedaan. Pertama, cakupan wilayah dalam penelitian ini yaitu pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, sedangkan penelitian Gita Maiyora yaitu pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Kedua, periode untuk penelitian ini adalah tahun anggaran 2016-2017, sedangkan penelitian Gita Maiyora adalah tahun anggaran 2010. Ketiga, variabel independen hanya terfokus pada dua variabel, yaitu PAD dan Dana Perimbangan, sedangkan penelitian Gita Maiyora mencakup lima variabel, yaitu ukuran (*size*), kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage* dan *intergovernmental revenue*. Keempat, variabel dependen dengan pengukuran rasio kemandirian, sedangkan penelitian Gita Maiyora dengan menggunakan rasio efisiensi. Maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2017)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- c. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi untuk mengambil kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan daerah.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini sebagai sarana memberikan informasi kepada masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat.
- c. Bagi civitas akademika UIN Walisongo Semarang, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi beberapa penelitian dengan objek penelitian yang sejenis.
- d. Bagi penulis dan para pembaca, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan, khususnya ilmu akuntansi sektor publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjabarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Hasil dan Analisis

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan keterbatasan penelitian yang dilakukan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Stewardship Theory*

Teori utama yang berkaitan dengan *good governance* dan pengungkapan laporan keuangan adalah teori *agency* dan *stewardship*.⁸ Dalam hubungannya dengan sektor publik, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori *agency* menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*, sedangkan teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara *principal* dan *steward*. Menurut Lex Donaldson dan James H. Davis, teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi.⁹

Teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara *principal* yaitu rakyat dan *stewards* yaitu pemerintah. Hubungan ini tercipta karena adanya sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan kejujuran pada pihak lainnya. Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat.

Teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori ini menjelaskan bahwa manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁰

⁸ Ariefia Nosihana dan Rizal Yaya, “*Internet Financial Reporting* dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB)*, Vol. 3, No. 2, 2016, h. 90-91.

⁹ Lex Donaldson and James H. Davis, “*Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return*”, *Australian Journal of Management*, Vol. 16, No. 1, 1991, p. 49-64.

¹⁰ Eko Raharjo, “Teori *Agency* dan Teori *Stewardship* Dalam Perspektif Akuntansi”, *Fokus Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2007, h. 39-40.

Pemerintah daerah dijelaskan dalam teori ini bahwa pemerintah selaku pelaksana pemerintahan akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama yaitu untuk kepentingan rakyat. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha secara maksimal dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, apabila tujuan ini mampu dicapai oleh pemerintah, maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.¹¹

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Secara sederhana, kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Apabila pencapaian melebihi target, maka kinerja dikatakan sangat baik, sedangkan apabila lebih rendah dari target maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya buruk.

Kinerja keuangan adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.¹²

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur dengan menggunakan indikator keuangan.

¹¹ Nailatul Fauza, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiri pada Pemerintah Daerah se Sumatera)", Jom FEKON, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 5.

¹² A. Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, h. 232.

2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan pencapaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan di masa mendatang.¹³

Pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.¹⁴ Masyarakat tentunya tidak mau terus-menerus ditarik pungutan, sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim¹⁵, menganalisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Berikut bentuk-bentuk rasio keuangan¹⁶:

¹³ I. Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2006, h. 275.

¹⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009, h. 121.

¹⁵ A. Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, ...*, h. 232-241.

¹⁶ Ramli Faud, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Cet.1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016, h. 138-146.

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

2) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

3) Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

4) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas (Keserasian Belanja Daerah) adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

5) Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode

berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

6) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

2.2.3 Rasio Keuangan sebagai Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui apakah Pemerintah Daerah aktif atau tidak membelanjakan dana yang ada untuk kegiatan pembangunan.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui sumber manakah yang memberikan kontribusi terbesar dan terkecil dalam pembentukan pendapatan daerah yang terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer

yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi untuk kota/kabupaten dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam perolehan pendapatan. Selain itu, juga akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam hal pengeluaran keuangan daerah, dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Hasilnya akan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan oleh Pemerintah Daerah untuk masa yang akan datang.

2.2.4 Konsep Islam Terkait Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan wujud pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan masyarakat kepada pemerintah daerah yang telah diatur oleh Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58 dan QS. Al-Anfal ayat 27. Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanat yang telah diterima untuk menyejahterakan rakyatnya.

- QS. An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebuah amanat harus disampaikan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang diamanati oleh rakyat dan harus menjalankan amanat tersebut dengan baik dan adil untuk kepentingan rakyatnya.

- QS. Al-Anfal ayat 27

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang telah diamanati tidak boleh berkhianat. Hal ini berhubungan dengan pemerintah yang telah diamanati oleh rakyat dan harus menjalankan pemerintahan dengan baik tanpa berkhianat dengan rakyat dengan lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi.

2.3 Dana Perimbangan

2.3.1 Pengertian Dana Perimbangan

Intergovernmental revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal serta

meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

2.3.2 Klasifikasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penjelasannya, Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiyai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

2.3.3 Konsep Islam Terkait Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dana perimbangan merupakan wujud dari keadilan dana yang diperoleh pemerintah pusat dan didistribusikan ke pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan antar pemerintah. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Zukhruf ayat 32:¹⁷

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Ayat diatas menjelaskan tentang keadilan Allah dalam pembagian riski kepada umatnya di dunia ini. Hal ini berhubungan dengan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk keadilan pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan antar pemerintah. Dengan adanya dana perimbangan membantu pemerintah daerah untuk membiayai roda pemerintahannya.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

¹⁷ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, Jilid 1, Cet. 1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, h. 86-87.

nilai kekayaan bersih. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka kinerja pemerintah dianggap semakin baik.

2.4.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim¹⁸, kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

1) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo, pajak daerah terdiri dari dua jenis¹⁹, yaitu:

a) Pajak Provinsi, terdiri atas:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

b) Pajak Kabupaten/Kota, antara lain adalah:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran

¹⁸ A. Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, ...*, h. 96-98.

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016, h. 15.

3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2) Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Mardiasmo, Objek retribusi daerah terdiri dari²⁰:

a) Jenis Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
3. Retribusi penggantian beban cetak peta
4. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
5. Retribusi pelayanan pendidikan
6. Retribusi pelayanan pesampahan/kebersihan
7. Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
8. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
9. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
10. Retribusi pelayanan pasar
11. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
12. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaku
13. Retribusi pengolahan limbah cair

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, ..., h. 18-20.

14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b) Jenis Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
3. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
4. Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
5. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahrag
6. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
7. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
8. Retribusi penyeberangan di air
9. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
10. Retribusi jasa usaha terminal
11. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan

c) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi izin trayek
2. Retribusi izin usaha perikanan
3. Retribusi izin mendirikan bangunan
4. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
5. Retribusi izin gangguan

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- e) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

2.4.3 Konsep Islam Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari daerah sendiri. Salah satunya adalah pajak yang telah diatur dalam QS. Al-Hujurat ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar*”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada umatnya untuk berjihad dengan hartanya. Jika negara mengalami kekurangan dana untuk membiayai pengeluarannya, maka negara berhak memungut pajak. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menarik pajak dari masyarakat untuk membiayai roda pemerintahan. Pemanfaatan PAD yang bersumber dari pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian menggunakan alat analisis yang sama namun menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian relevan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mirna Sesotyaningtyas (2012), yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa”. Hasil dari penelitian ini adalah *leverage*, ukuran legislatif dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda, sedangkan pendapatan pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.²¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin (2012), yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”. Hasil dari penelitian ini adalah PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap keuangan kinerja pemda Aceh.²²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Gita Maiyora (2015), yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera). Hasil dari penelitian ini adalah *size* dan *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda, sedangkan *wealth* (PAD), ukuran legislatif dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda.²³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Asmaul Azis (2016), yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja

²¹ Mirna Sesotyaningtyas, “Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, ..., h. 5

²² Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”, ..., h. 27.

²³ Gita Maiyora, “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)”, ..., h. 13-14.

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”. Hasil penelitian ini adalah ukuran pemda, belanja modal dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.²⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016), yang berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan (Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemda dan opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan kemakmuran, *intergovernmental revenue* dan temuan audit BPK tidak berpengaruh.²⁵

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mirna Sesotyaningtyas (2012)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Legislatif, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah <i>Leverage</i>, Ukuran Legislatif, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Pajak Daerah • Variabel dependen adalah kinerja keuangan pemda (Rasio efisiensi) 	<i>Leverage</i> , ukuran legislatif dan <i>intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda, sedangkan pendapatan pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda
2	Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan • Variabel dependen adalah kinerja keuangan pemda (Rasio efisiensi) 	PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda Aceh

²⁴ Asmaul Azis, “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”, EKSIS, Vol. XI, No. 1, 2016, h. 99-100.

²⁵ Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati, “Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan”, ..., h. 1176-1177.

3	Gita Maiyora (2015)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah karakteristik pemda berupa <i>size</i>, <i>intergovernmental revenue</i>, <i>wealth</i> (PAD), ukuran legislatif dan <i>leverage</i> • Variabel dependen adalah kinerja keuangan pemda (Rasio efisiensi) 	<i>Size</i> dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda, sedangkan <i>wealth</i> (PAD), ukuran legislatif dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda
4	Asmaul Azis (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah karakteristik pemda berupa ukuran pemda, belanja modal dan <i>intergovernmental revenue</i> • Variabel dependen adalah kinerja keuangan pemda (Rasio efisiensi) 	Ukuran pemda, belanja modal dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda
5	Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016)	Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan (Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah Ukuran Pemerintah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK • Variabel dependen adalah kinerja keuangan pemda (Rasio kemandirian, ekonomi, efisiensi dan efektivitas) 	Ukuran pemda dan opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda, sedangkan kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> dan temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda

2.6 Perumusan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin (2012) mengartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah jasa tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaannya berupa pungutan dari penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur oleh undang-undang.²⁶

Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah, karena semakin besar PAD maka tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat membiayai sendiri kebutuhan pemerintah tanpa harus bergantung dengan dana dari pemerintah pusat. Semakin besar PAD berarti pemerintah daerah telah berhasil menggali sumber-sumber PAD secara optimal dan dapat memanfaatkannya secara bijak.

Hasil penelitian Cherry Dha Wenny (2012) menunjukkan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.²⁷ Artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis pertama yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Kemandirian Keuangan)

²⁶ Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh", ..., h. 23.

²⁷ Cherry Dha Wenny, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan", Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol. 2, No.1, 2012, h. 49.

2.6.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Intergovernmental Revenue adalah sejumlah transfer dana dari pemerintah pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah, atau biasa disebut dengan dana perimbangan. Semakin besar dana perimbangan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah semakin tinggi. Pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat untuk membiayai segala aktivitas ke pemerintahannya.

Hasil penelitian Elychia Roly Putri (2014) menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.²⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar *intergovernmental revenue*, berarti tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah semakin rendah karena masih bergantung dari dana pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis kedua yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Kemandirian Keuangan)

2.6.3 Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai semua aktivitasnya. Kedua sumber pendanaan ini sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Hasil penelitian Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin (2012) menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.²⁹

²⁸ Elychia Roly Putri, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012)", Skripsi Universitas Lampung, 2014, h. 48.

²⁹ Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh", ..., h. 27.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja keuangan pmda adalah dengan menggunakan analisis rasio kemandirian daerah. Maka PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang berbeda, yaitu PAD berpengaruh positif dan dana perimbangan berpengaruh negatif.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis ketiga yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

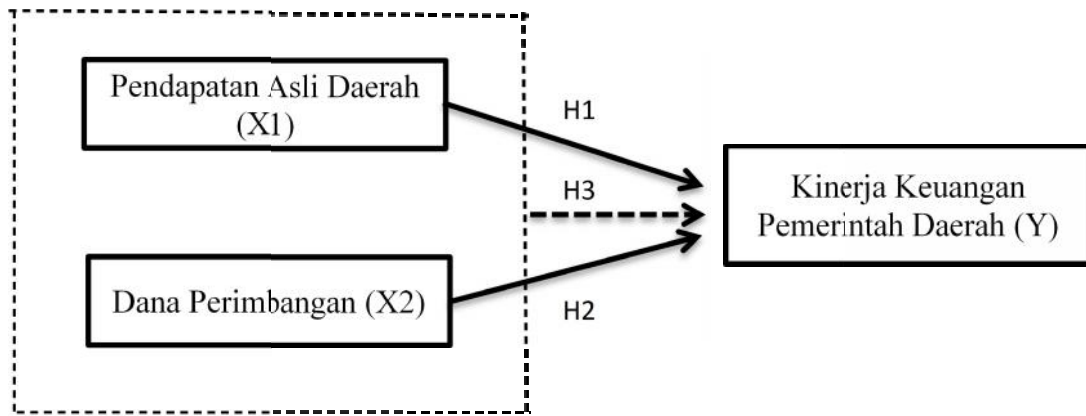
H₃ : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Kemandirian Keuangan)

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritik

Berikut ini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritik



Keterangan :

- ▶ : Uji Parsial
- - - - -▶ : Uji Simultan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut berupa data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017.

3.2 Populasi

Penelitian ini adalah penelitian berbasis populasi. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, maka seluruh kabupaten dan kota dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 3.1

Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama Kabupaten/Kota
1	Kab. Banjarnegara
2	Kab. Banyumas
3	Kab. Batang
4	Kab. Blora
5	Kab. Boyolali
6	Kab. Brebes
7	Kab. Cilacap
8	Kab. Demak
9	Kab. Grobogan
10	Kab. Jepara
11	Kab. Karanganyar
12	Kab. Kebumen
13	Kab. Kendal
14	Kab. Klaten
15	Kab. Kudus
16	Kab. Magelang
17	Kab. Pati
18	Kab. Pekalongan
19	Kab. Pemasang

20	Kab. Purbalingga
21	Kab. Purworejo
22	Kab. Rembang
23	Kab. Semarang
24	Kab. Sragen
25	Kab. Sukoharjo
26	Kab. Tegal
27	Kab. Temanggung
28	Kab. Wonogiri
29	Kab. Wonosobo
30	Kota Magelang
31	Kota Pekalongan
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Surakarta
35	Kota Tegal

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses perolehan data dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis data-data yang diperlukan. Data yang dimaksud berupa laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukurannya

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel stimulus atau variabel yang memengaruhi variabel lain.³⁰ Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

³⁰ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012, h. 54.

Pengukuran PAD dalam penelitian ini dihitung dengan mencari kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah sebagai berikut (Putri, 2015) :

$$PAD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b) Dana Perimbangan (X_2)

Intergovernmental revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

Pengukuran Dana Perimbangan dalam penelitian ini dihitung dengan mencari kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah sebagai berikut (Putri, 2015) :

$$\text{Dana Perimbangan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel bebas.³¹ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut³² :

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} \\ & = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerinah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\% \end{aligned}$$

³¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, ...*, h. 54

³² Ramli Faud, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Cet.1, ...*, h. 139.

Untuk menilai tinggi rendahnya kemandirian pemerintah daerah, bisa mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, seperti Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian (%)
Rendah sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 / 1996

Rasio kemandirian keuangan menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

Pada penelitian ini, kinerja keuangan daerah yang digunakan sebagai data penelitian adalah kemandirian keuangan daerah pada tahun berikutnya (Y_{n+1}). Hal tersebut dikarenakan konsep pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh PAD dan Dana Perimbangan pada tahun tertentu (X_n) akan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan di tahun berikutnya (Y_{n+1}), sehingga data yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah tahun 2016-2017.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi.³³ Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat

³³ Suharyadi dan Purwanto, *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 10.

pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan.³⁴ Pengukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif ini meliputi jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Regresi linear berganda harus memenuhi asumsi-asumsi klasik agar menghasilkan nilai-nilai koefisiensi yang tidak bias. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa uji diantaranya yaitu:

a. Uji Asumsi Normalitas

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak sebagai berikut:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.
- Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.

Uji normalitas dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan regresi dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Jika signifikansi pada nilai Kolmogrov Smirnov $< 0,05$ maka H_0 ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai K-S $> 0,05$, maka H_0 diterima, jadi data residual berdistribusi normal.³⁵

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 138.

³⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7, Semarang: UNDIP, 2013, h. 160-163.

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *Tolerance*. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0.10, maka model dapat dikatakan bebas dari multikolonieritas.³⁶

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.³⁷

Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot dan uji glejser. Pada uji grafik plot, ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat di deteksi dengan melihat pola pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika terdapat pola tertentu, maka di indikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila variabel independen secara statistik tidak

³⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7, ..., h. 105-106.

³⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7, ..., h. 139.

mempengaruhi variabel dependen, maka tidak ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah menggunakan uji Durbin-Watson (DW test)³⁸. Dasar keputusan ada atau tidaknya korelasi adalah sebagai berikut :

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.³⁹

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,

³⁸ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7, ..., h. 110-111.

³⁹ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7, ..., h. 95.

sedangkan variabel bebasnya terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2).

Dengan persamaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{t+1} = + 1X1_{t0} + 2X2_{t0} +$$

Dimana:

Y_{t+1} = Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun t + 1

= Konstanta

1, 2 = Koefisien regresi

$X1_{t0}$ = Pendapatan Asli Daerah pada tahun t

$X2_{t0}$ = Dana Perimbangan pada tahun t

= Standar *error*

3.5.4 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi independen. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai R^2 semakin mendekati 1, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, jika R^2 semakin kecil mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas.⁴⁰

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Dengan syarat jika probabilitas memenuhi syarat signifikansi lebih

⁴⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7, ..., h. 97.

kecil dari 0.05 atau dapat dilihat dari nilai F hitung lebih besar dari F tabel , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.⁴¹

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel pada taraf signifikan 0.05 maka H_a ditolak. Sedangkan jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka H_a diterima.⁴²

⁴¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7, ..., h. 98.

⁴² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7, ..., h. 98-99.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten dan kota, di mana terdapat 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 213.851 hektar, sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 37.365 hektar.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten/kota (Tabel 3.1) dan tahun pengamatan selama dua tahun, maka data dalam penelitian ini berjumlah 70 data.

4.2 Deskripsi Variabel

4.2.1 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Dalam perhitungan rasio kemandirian melibatkan pendapatan asli daerah dan total bantuan dari pusat/provinsi dan pinjaman. Pada Lampiran 2, menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2016 dan 2017 di 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. Rasio kemandirian berkisar antara 11,28% sampai dengan 82,47%. Prosentase 11,28% terjadi di Kab. Blora tahun 2017 dan prosentase 82,47% terjadi di Kota Semarang tahun 2017.

4.2.2 Variabel Dependen

a) Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Pendapatan asli daerah di Jawa Tengah berasal dari empat sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada lampiran 3, dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah, PAD pada tahun 2015 dan 2016 berkisar antara 8,75% sampai dengan 36,35% dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Prosentase 8,75% terjadi di Kab. Klaten pada tahun 2015 dengan PAD sebesar Rp 190.622.670.128 dan prosentase 36,35% terjadi di Kota Semarang pada tahun 2016 dengan PAD sebesar Rp 1.491.645.900.065.

b) Dana Perimbangan (X_2)

Dana perimbangan di Jawa Tengah berasal dari tiga sumber, yaitu dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Pada lampiran 3, dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah, dana perimbangan pada tahun 2015-2016 berkisar antara 37,95% sampai dengan 84,30% dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Prosentase 37,95% terjadi di Kota Semarang pada tahun 2015 dengan dana perimbangan sebesar Rp 1.270.371.271.674 dan prosentase 84,30% terjadi di Kota Salatiga pada tahun 2016 dengan dana perimbangan sebesar Rp 569.849.837.883.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian agar memperjelas keadaan data yang bersangkutan. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Data dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Tabel 4.1 berikut ini menyajikan statistik deskriptif atas variabel-variabel yang terlihat dalam penelitian ini.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	70	8,75	36,35	15,9829	5,70879
Dana_Perimbangan	70	37,95	84,30	61,9006	7,55528
Kinerja_Pemda	70	11,28	82,47	23,2907	11,61799
Valid N (listwise)	70				

Sumber: data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Kemandirian Daerah) pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2017 adalah sebesar 23,29% dengan nilai standar deviasinya sebesar 11,62%. Rata-rata tingkat kemandirian Jawa Tengah sebesar 23,29% termasuk ke dalam kriteria kemandirian keuangan yang rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih sangat bergantung dengan bantuan dari pusat ataupun daerah dan belum dapat menggali sumber PAD secara optimal.

Daerah yang memiliki nilai tertinggi atau kemandirian keuangan paling tinggi adalah Kota Semarang sebesar 82,47% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya. Sedangkan daerah yang memiliki nilai terendah atau memiliki kemandirian keuangan yang paling rendah adalah Kab. Blora sebesar 11,28 % pada tahun 2017 (Lampiran 2).

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah selama periode 2015-2016 sebesar 15,98% dengan nilai standar deviasinya sebesar 5,71%. Nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa penyebaran data baik dan merata. Daerah yang memiliki nilai tertinggi atau memiliki PAD yang paling tinggi adalah Kota Semarang sebesar 36,35% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena posisi Kota Semarang yang sangat strategis, sebagai ibu kota provinsi, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa dan fasilitas

lainnya yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian Kota Semarang. Sementara daerah yang memiliki nilai terendah atau memiliki PAD yang paling rendah adalah Kab. Klaten sebesar 8,75% pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena Kab. Klaten sumber pendapatan dari pajak, retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah kontribusinya masih rendah terhadap pendapatan asli rendah atau daerah yang memiliki kemampuan rendah dalam menggali PAD (Lampiran 3).

Rata-rata Dana Perimbangan Jawa Tengah selama periode 2015-2016 sebesar 61,90% dengan nilai standar deviasinya sebesar 7,55%. Nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa penyebaran data baik dan merata. Daerah yang memiliki nilai tertinggi atau memiliki Dana Perimbangan yang paling tinggi adalah Kota Salatiga sebesar 84,30% pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Salatiga adalah daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Sementara daerah yang memiliki nilai terendah atau memiliki Dana Perimbangan yang paling rendah adalah Kota Semarang sebesar 37,95% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang daerah yang tidak banyak bergantung terhadap pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat.

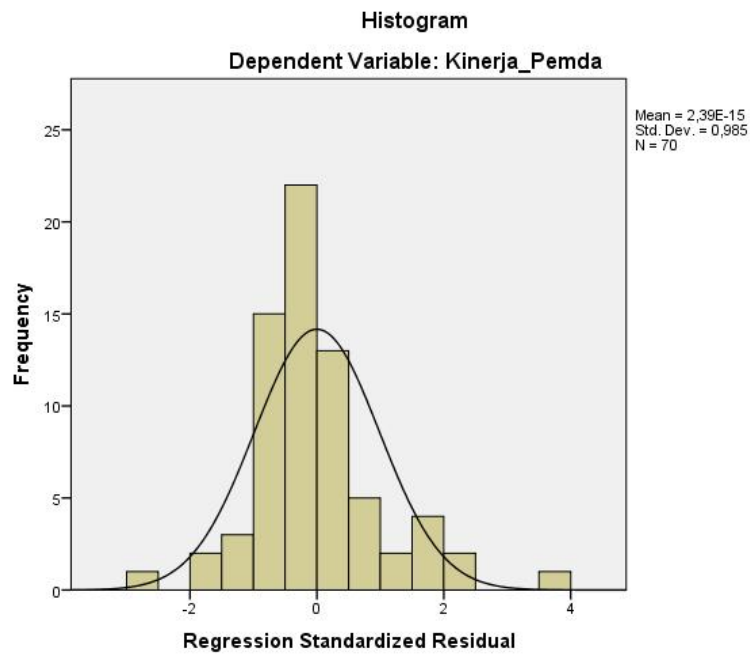
4.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik maka dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan dua macam uji normalitas yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik terdiri atas grafik histogram dan *normal probability plot*. Hasil pengolahan data menggunakan analisis grafik dapat dilihat sebagai berikut:

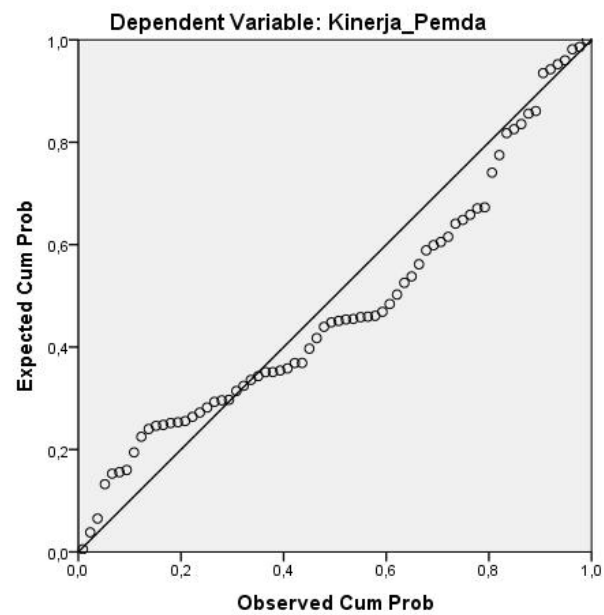
Grafik 4.1
Grafik Histogram



Grafik 4.2

Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa grafik histogram memiliki pola distribusi yang menceng ke kiri dan tidak normal. Sedangkan grafik *normal probability plot* memiliki titik-titik yang agak menjauh dari garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terdistribusi secara normal atau menyalahi asumsi normalitas. Selanjutnya model regresi akan di uji menggunakan analisis statistik:

Tabel 4.2
Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,10765919
Most Extreme Differences	Absolute	,132
	Positive	,132
	Negative	-,108
Test Statistic		,132
Asymp. Sig. (2-tailed)		,004 ^c

a. Test distribution is Normal.

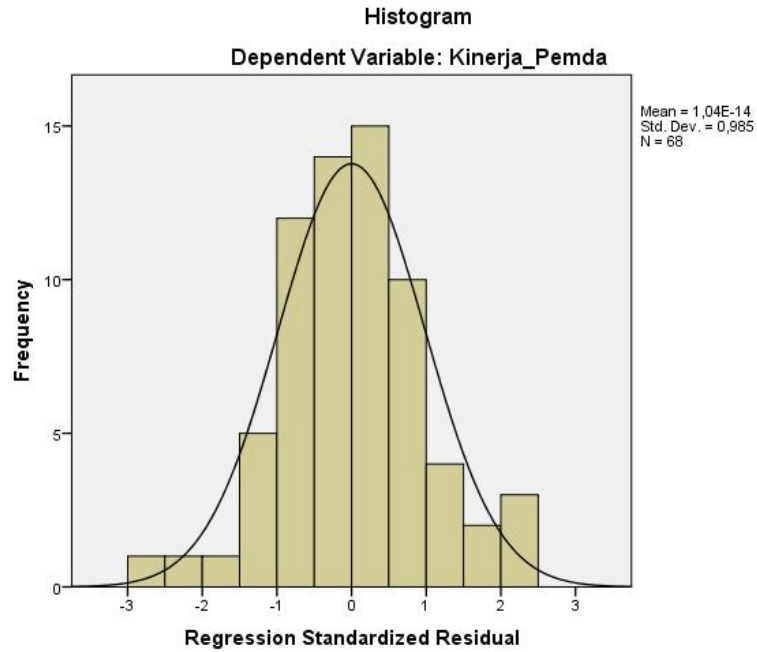
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila tingkat signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa tingkat signifikansi memiliki nilai $0,004 < 0,05$ yang tidak memenuhi asumsi normalitas.

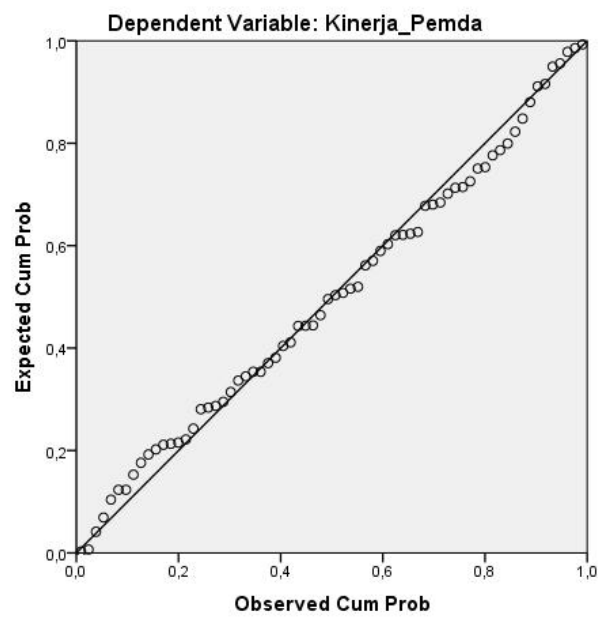
Agar model regresi menjadi normal, maka perlu di lakukan data screening dan transformasi data. Peneliti melakukan transformasi data menggunakan logaritma natural (Ln) sehingga data berkurang sebanyak 2 data. Setelah melakukan tranformasi data, langkah screening selanjutnya adalah mendeteksi adanya outlier. Peneliti menghapus 2 data outlier (1 Kota, yaitu Kota Semarang). Dari hasil transformasi, data yang terpakai menjadi 68 data. Berikut hasil uji setelah data screening dan transformasi data:

Grafik 4.3
Grafik Histogram



Grafik 4.4
Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa pola distribusi tidak menceng dan normal. Grafik *normal probability plot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik terdistribusi mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal atau uji normalitas dapat diterima. Hasil pengolahan data menggunakan analisis statistik dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14272059
Most Extreme Differences	Absolute	,056
	Positive	,052
	Negative	-,056
Test Statistic		,056
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

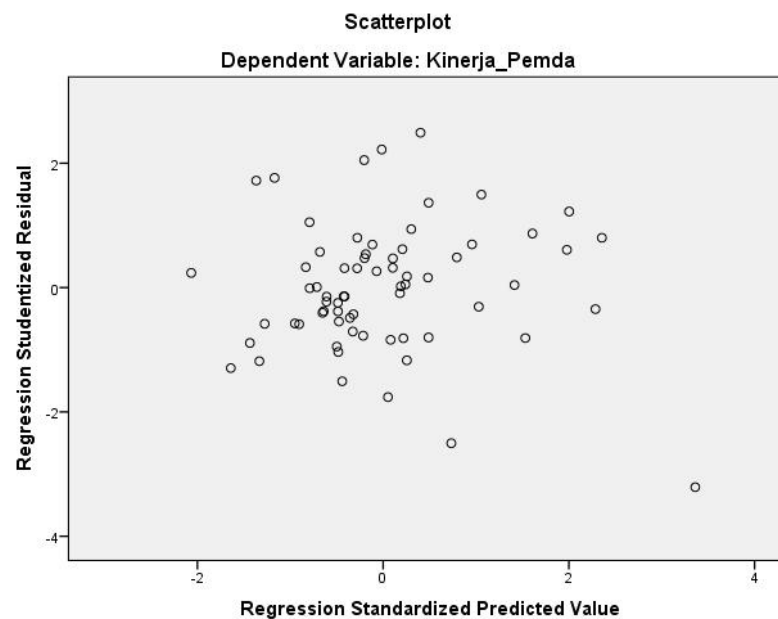
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Data residual dikatakan normal jika nilai signifikansi diatas 0,05. Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa data penelitian terdistribusi secara normal, karena tingkat signifikansi lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Terdapat dua macam cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu menggunakan grafik *scatterplot* dan uji glejser. Berikut hasil pengolahan data menggunakan grafik *scatterplot*:

Grafik 4.5
Grafik Scatterplot



Jika pola pada *scatterplot* menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola yang jelas, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas, dapat diketahui bahwa pola pada *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas sehingga dapat diartikan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengolahan data menggunakan analisis statistik dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Glejser

Coefficients^a

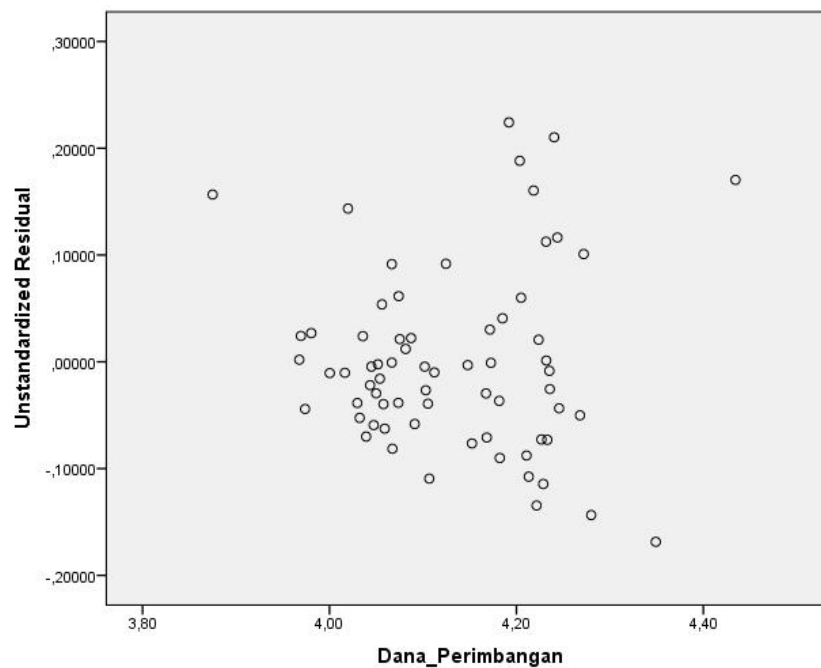
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,319	,437		-3,018	,004
	PAD	,036	,040	,104	,902	,371
	Dana_Perimbangan	,322	,102	,362	3,150	,002

a. Dependent Variable: AbsUT

Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel diatas, ada variabel independen yang tidak mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi diatas 0,05 dan ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05. Variabel PAD memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,371 > 0,05$ dan variabel dana perimbangan memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terjadi heteroskedastisitas.

Cara untuk menghilangkan heteroskedastisitas pada variabel dana perimbangan maka perlu dilakukan transformasi data. Menentukan model transformasi yang cocok maka dilakukan plotting residual terhadap variabel dana perimbangan dengan cara Graph → Legacy Dialog → Scatterplot.

Grafik 4.6
Scatterplot



Berdasarkan scatterplot diatas dapat dilihat hasil plot residual terhadap dana perimbangan dapat disimpulkan bahwa model transformasi yang cocok adalah akar kuadrat dana perimbangan ($\sqrt{\text{dana perimbangan}}$) sehingga model persamaan regresi menjadi seperti:

$$\frac{KP}{\sqrt{\text{dana perimbangan}}} = \beta_1 \frac{1}{\sqrt{\text{dana perimbangan}}} - \beta_2 \sqrt{\text{dana perimbangan}} + v$$

Kemudian lakukan estimasi regresi melalui perintah transform dan compute untuk menghasilkan variabel baru yaitu $Y = \frac{KP}{\sqrt{\text{dana perimbangan}}}$, $X1 = \frac{1}{\sqrt{\text{dana perimbangan}}}$ dan $X2 = \sqrt{\text{dana perimbangan}}$. Regresi ini tanpa intercept atau regresi lewat titik origin. Maka hasil dari output SPSS adalah:

Tabel 4.5

Uji Glejser

Coefficients^{a,b}

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	X1	,468	1,435	,154	,326	,745
	X2	,621	,347	,842	1,786	,079

a. Dependent Variable: Y_KP

b. Linear Regression through the Origin

Dari hasil tabel diatas, dapat dilihat bahwa signifikansi X2 (Dana Perimbangan) yaitu $0,79 > 0,05$. Dan untuk X1 (PAD), signifikansinya $0,745 > 0,05$. Hal ini berarti variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas atau tidak. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2,283	,734		-3,109	,003		
PAD	,946	,067	,848	14,208	,000	1,000	1,000
Dana_Perimbangan	,669	,172	,232	3,891	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemda

Model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel PAD dan variabel Dana Perimbangan memiliki nilai *tolerance* sebesar $1,000 > 0,10$ serta VIF sebesar $1,000 < 10$. Hal tersebut berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Model regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif apabila $-d < d < 4 - d$. Berikut hasil pengujian autokorelasi:

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2,008

a. Predictors: (Constant), Dana_Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja_Pemda

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,008. Jika dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah observasi (n) = 68 dan jumlah variabel independen 2 ($k=2$) diperoleh nilai du pada tabel dw sebesar 1,6678 dan nilai dl sebesar 2,3322. Nilai DW berada diantara du dan $4 - du$ yaitu $1,6678 < 2,008 < 2,3322$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif.

4.4 Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu PAD dana dana perimbangan terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah (Rasio kemandirian). Hasil persamaan regresi yang diolah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.8

Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,283	,734		-3,109	,003
	PAD	,946	,067	,848	14,208	,000
	Dana_Perimbangan	,669	,172	,232	3,891	,000

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$KP = -2,283 + 0,946 PAD + 0,669 DP$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar -2,283 artinya apabila variabel PAD dan Dana Perimbangan (DP) bernilai nol (0), maka Kinerja keuangan pemda (KP) tetap sebesar -2,283. Tetapi untuk apa memprediksi kinerja keuangan pemda jika PAD dan dana perimbangannya belum tersedia, karena tidak ada sumber dana untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Konstanta negatif bisa diabaikan selama model regresi sudah memenuhi uji asumsi

klasik untuk regresi ganda. Konstanta negatif umumnya terjadi jika ada rentang yang cukup jauh antara X (variabel independen) dan Y (variabel respon).⁴³ Pada penelitian ini, X1 memiliki rentang nilai 8,75% - 36,35%, X2 memiliki rentang nilai 37,95% - 84,30% sedangkan Y memiliki rentang nilai 11,28% - 82,47%.

- b. Koefisien regresi pada variabel PAD sebesar 0,946 adalah positif. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan PAD sebesar 1%, maka Kinerja keuangan pemda (KP) akan naik sebesar 0,946 dimana faktor-faktor lain dianggap tetap.
- c. Koefisien regresi pada variabel Dana Perimbangan (DP) sebesar 0,669 adalah positif. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan Dana Perimbangan (DP) sebesar 1%, maka Kinerja keuangan pemda (KP) akan naik sebesar 0,669 dimana faktor-faktor lain dianggap tetap.

4.5 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel PAD dan dana perimbangan dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 ^a	,769	,762	,14490

a. Predictors: (Constant), Dana_Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja_Pemda

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,762. Hal ini berarti bahwa 76,2% kinerja keuangan pemda

⁴³ Mendenhall, William, *A Second Course in Statistics: Regression Analysis [7th (Seventh) Edition]*, Prentice Hall, 2011, p. 99.

dapat dijelaskan oleh variable PAD dan dana perimbangan. Sedangkan sisanya ($100\% - 76,2\% = 23,8\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Standard Error Estimate (SEE) sebesar 0,14490, semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

b. Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pemda. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,534	2	2,267	107,966	,000 ^b
	Residual	1,365	65	,021		
	Total	5,898	67			

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemda

b. Predictors: (Constant), Dana_Perimbangan, PAD

Variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel independen apabila tingkat signifikansi $< 0,05$. Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.

c. Uji t

Uji statistik t menunjukkan pengaruh masing-masing variabel variabel PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemda. Hasil pengolahan data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.11
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,283	,734		-3,109	,003
PAD	,946	,067	,848	14,208	,000
Dana_Perimbangan	,669	,172	,232	3,891	,000

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemda

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat signifikansi masing-masing variabel. Variabel PAD memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemda, maka H_1 diterima.

Variabel dana perimbangan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemda, maka H_2 ditolak karena pengaruh berlawanan arah.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama penelitian yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemda diterima, karena berdasarkan uji yang telah dilakukan variabel PAD memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (dibawah 5%).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin (2012) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Aceh menekankan

hasil atas PAD mereka berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang.⁴⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil penelitian Riswanda Imawan dan Agus Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa variabel *wealth* (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah Jawa Tengah. Kemakmuran sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang berjalan di daerah tersebut. PDRB yang tinggi mengindikasikan kegiatan ekonomi daerah bergeliat dengan baik, dengan begitu jumlah pemasukan pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Banyaknya faktor produksi yang muncul tersebut akan memunculkan pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi yang menjadi pemasukan bagi kas daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi akan menyebabkan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin baik.⁴⁵

Otonomi daerah dibiayai dari pendapatan daerah dan yang bersumber dari PAD menjadi perhatian yang lebih utama dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, dikarenakan PAD merupakan pendapatan yang bersumber asli dari pengelolaan daerah itu sendiri. Salah satunya adalah pajak. PAD tentang pajak diterangkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 15. Jika negara mengalami kekurangan dana untuk membiayai pengeluarannya, maka negara berhak memungut pajak. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menarik pajak dari masyarakat untuk membiayai roda pemerintahan. Semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin mandiri suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan PAD sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Peningkatan PAD dalam mewujudkan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan optimalisasi PAD dengan cara

⁴⁴ Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh", ..., h. 25.

⁴⁵ Riswanda Imawan dan Agus Wahyudin, "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3, No. 2, 2014, h. 152.

menerapkan beberapa cara, di antaranya adalah dengan melaksanakan kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Strategi intensifikasi merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang sudah ada, sedangkan strategi ekstensifikasi merupakan strategi yang digunakan untuk menggali potensi daerah yang baru selama dalam batas undang-undang.

b. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua penelitian yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditolak, karena nilai koefisien regresi bernilai positif dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Asmaul Azis (2016) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur. Semakin tinggi *intergovernmental revenue* semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Besarnya *intergovernmental revenue* menunjukkan bahwa tersedianya dana yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih baik.⁴⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Gita Maiyora (2015) bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang diprosikan dengan porsi DAU dalam total realisasi pendapatan daerah sesuai dengan hipotesis yaitu berpengaruh positif signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi DAU terhadap pemerintah pusat maka semakin tinggi pula tingkat kinerja keuangan pemerintah. Hal ini

⁴⁶ Asmaul Azis, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)", ..., h. 99.

berarti *Intergovernmental Revenue* merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan.⁴⁷

Selain PAD, sumber pendapatan utama pemerintah daerah berasal dari dana perimbangan, yaitu transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Tujuan adanya dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menerapkan keadilan pembagian dana. Keadilan pemerintah pusat diterangkan dalam QS. Al-Zukhruf ayat 32. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk keadilan pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan antar pemerintah. Dengan adanya dana perimbangan membantu pemerintah daerah untuk membiayai roda pemerintahannya.

Dalam penelitian ini, dana perimbangan memberikan pengaruh yang positif dalam kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi dana perimbangan, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah masih sangat bergantung dengan dana perimbangan, hal ini dibuktikan dengan sampel yang secara keseluruhan prosentase dana perimbangan lebih besar 50% dari total pendapatan daerah. Kegiatan pemerintahan berarti dijalankan oleh sebagian besar dana perimbangan. Semakin besar dana perimbangan, maka kinerja pemerintah daerah semakin baik, karena pemerintah daerah dapat memanfaatkannya dengan baik untuk menjalankan pemerintahan.

c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga penelitian yang menyatakan bahwa PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima, karena berdasarkan uji yang telah dilakukan variabel PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh

⁴⁷ Gita Maiyora, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)", ..., h. 14.

terhadap kinerja keuangan pemda. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (dibawah 5%).

Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda dikarenakan keduanya merupakan sumber pendanaan terbesar dalam kegiatan pemerintahan. PAD yang besar menandakan bahwa pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan daerah yang dimiliki secara maksimal. Sedangkan dana perimbangan yang besar dapat meningkatkan kinerja keuangan pemda dengan syarat dana perimbangan tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal dan bijak untuk kegiatan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2017)**”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar PAD maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Hal ini karena pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli yang bersumber dari daerah.
2. Dana perimbangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar dana perimbangan maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana perimbangan dengan optimal untuk kegiatan pemerintahan.
3. Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika kedua variabel independen tersebut bertambah atau berkurang secara bersama-sama maka variabel dependen akan mengikuti ke arah yang sama.

5.2 Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini hanya menggunakan satu indikator untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan rasio kemandirian.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu PAD dan dana perimbangan. Mungkin masih banyak lagi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah selain yang diuji dalam penelitian ini.

- c. Penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2017.

5.3 Saran

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya, karena berdasarkan hasil penelitian rata-rata tingkat kemandirian pemerintah daerah hanya sebesar 23,29% yang termasuk kategori rendah sekali.
- b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk *pertama*, dapat menguji variabel lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Kedua*, peneliti selanjutnya diharapkan menambah rentang waktu yang lebih panjang sehingga akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi. *Ketiga*, peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain yang terkait dengan pengaruh kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R., A. Rohman, D. Ratmono, dan Ghozali, I. (2016). Accrual Based Acccountig Implementation: An Approach For Modelling Major Decisions. *Risk Governance & Control*, 6 (12), 531-539.
- Azis, Asmaul. (2016). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”, *EKSIS*, Vol. XI, No. 1.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFPE.
- Data BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Donalson, Lex and James H. Davis. (1991). “*Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return*”. *Australian Journal of Managemen*, Vol. 16, No. 1.
- Faud, Ramli. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Cet.1. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Fauza, Nailatul. (2015). “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiri pada Pemerintah Daerah se Sumatera)*”. *Jom FEKON*, Vol. 1, No. 2.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7. Semarang: UNDIP.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
- Imawan, Riswanda dan Agus Wahyudin. (2014). “*Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012*”, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3, No. 2.
- Juliawati, Ebit, Darwanis dan Jalaluddin. (2012). “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*”. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 1, No. 1.
- Keppmendagri No. 690.900.327. (1996).

- Maiyora, Gita. (2015). “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)*”. Jom FEKON. Vol. 2, No. 2.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masdiantini, Putu Riesty dan Ni Made Adi Erawati. (2016). “*Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Nosihana, Ariefia dan Rizal Yaya. (2016). “*Internet Financial Reporting dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia*”. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB), Vol. 3, No. 2.
- Nurfmrembang. (2017). *Tak Hanya Adipura, Tahun 2018 Rembang Juga Incar WTP* (<https://www.nurfmrembang.com/berita/tak-hanya-adipura-tahun-2018-rembang>) diakses 22 September 2018.
- Pramono, Joko. (2014). “*Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta)*”. Jurnal STIE AMA Salatiga. Vol. 7, No. 13.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Putri, Elychia Roly. (2014). “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012)*”. Skripsi Universitas Lampung.
- Raharjo, Eko. (2007). *Teori Agency dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*. Fokus Ekonomi, Vol. 2, No. 1.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.

- Rivai, Veithzal dkk. (2010). *Islamic Financial Management*, Jilid 1, Cet. 1. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sesotyaningtyas, Mirna. (2012). “*Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*”. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 1, No. 1.
- Suharyadi dan Purwanto. (2013). *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Wenny, Cherry. (2012). “*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*”. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol. 2, No.1.
- William Mendenhall. (2011). *A Second Course in Statistics: Regression Analysis* [7th (Seventh) Edition]. Prentice Hall.

Lampiran 1

Target dan Realisasi PAD Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Target	Realisasi	%
1	Kab. Banjarnegara	Rp 277.400.917.500	Rp 297.485.382.003	107%
2	Kab. Banyumas	Rp 571.033.167.996	Rp 619.701.627.380	109%
3	Kab. Batang	Rp 219.356.311.813	Rp 219.807.128.307	100%
4	Kab. Blora	Rp 268.303.892.156	Rp 280.042.019.102	104%
5	Kab. Boyolali	Rp 362.931.489.000	Rp 388.014.897.386	107%
6	Kab. Brebes	Rp 510.848.264.000	Rp 523.660.773.732	103%
7	Kab. Cilacap	Rp 612.077.977.866	Rp 648.091.381.096	106%
8	Kab. Demak	Rp 283.670.499.000	Rp 309.612.407.201	109%
9	Kab. Grobogan	Rp 440.891.892.189	Rp 440.456.238.668	100%
10	Kab. Jepara	Rp 300.243.532.000	Rp 325.530.346.533	108%
11	Kab. Karanganyar	Rp 381.557.551.385	Rp 415.142.563.370	109%
12	Kab. Kebumen	Rp 437.343.224.000	Rp 443.608.862.461	101%
13	Kab. Kendal	Rp 395.818.878.534	Rp 404.978.613.972	102%
14	Kab. Klaten	Rp 335.512.441.000	Rp 371.718.439.306	111%
15	Kab. Kudus	Rp 373.804.376.000	Rp 366.031.203.778	98%
16	Kab. Magelang	Rp 399.425.826.000	Rp 403.561.238.310	101%
17	Kab. Pati	Rp 416.966.354.000	Rp 449.821.345.800	108%
18	Kab. Pekalongan	Rp 300.887.832.132	Rp 305.394.299.061	101%
19	Kab. Pemasang	Rp 405.333.931.000	Rp 425.893.266.850	105%
20	Kab. Purbalingga	Rp 347.907.007.000	Rp 355.859.003.583	102%
21	Kab. Purworejo	Rp 269.067.899.710	Rp 298.606.494.653	111%
22	Kab. Rembang	Rp 308.606.440.110	Rp 300.319.284.807	97%
23	Kab. Semarang	Rp 363.698.928.000	Rp 417.417.843.831	115%
24	Kab. Sragen	Rp 401.875.430.000	Rp 404.569.404.722	101%
25	Kab. Sukoharjo	Rp 391.127.036.000	Rp 464.567.409.857	119%
26	Kab. Tegal	Rp 370.098.012.000	Rp 375.531.165.351	101%
27	Kab. Temanggung	Rp 307.083.335.256	Rp 308.466.748.340	100%
28	Kab. Wonogiri	Rp 300.922.361.334	Rp 333.840.434.905	111%
29	Kab. Wonosobo	Rp 210.138.740.720	Rp 228.017.473.938	109%
30	Kota Magelang	Rp 218.085.185.000	Rp 233.557.714.356	107%
31	Kota Pekalongan	Rp 197.597.634.000	Rp 192.002.871.181	97%
32	Kota Salatiga	Rp 188.391.649.000	Rp 220.243.361.132	117%
33	Kota Semarang	Rp 1.692.399.101.122	Rp 1.791.886.378.674	106%
34	Kota Surakarta	Rp 492.503.909.101	Rp 527.544.224.971	107%
35	Kota Tegal	Rp 310.927.508.000	Rp 306.830.656.135	99%

Sumber: Data BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang diolah.

Lampiran 2

Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Kemandirian

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain PD yang Sah	Total Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi	Hasil (%)
1	Kab. Banjarnegara	2017	Rp 297.485.382.003	Rp 1.421.124.445.787	Rp 1.185.202.700	Rp 1.869.130.576.787	15,92
		2016	Rp 221.048.387.512	Rp 1.264.069.069.612	Rp 1.584.596.500	Rp 1.613.382.095.125	13,70
2	Kab. Banyumas	2017	Rp 619.701.627.380	Rp 1.868.367.395.431	Rp 213.654.104.701	Rp 2.387.902.320.813	25,95
		2016	Rp 541.418.386.912	Rp 1.869.097.347.790	Rp 59.937.140.800	Rp 2.251.612.862.479	24,05
3	Kab. Batang	2017	Rp 219.807.128.307	Rp 993.464.937.327	Rp 2.123.880.132	Rp 1.344.223.712.375	16,35
		2016	Rp 209.957.559.449	Rp 1.031.465.973.389	Rp 175.309.382.963	Rp 1.113.347.151.681	18,86
4	Kab. Blora	2017	Rp 280.042.019.102	Rp 1.348.442.240.943	Rp 214.997.126.194	Rp 1.518.790.298.934	18,44
		2016	Rp 171.277.522.706	Rp 1.331.611.361.558	Rp 168.226.706.298	Rp 1.518.683.687.233	11,28
5	Kab. Boyolali	2017	Rp 388.014.897.386	Rp 1.354.438.480.868	Rp 13.208.936.000	Rp 1.775.272.436.868	21,86
		2016	Rp 292.310.032.226	Rp 1.358.444.509.320	Rp 15.000.000.000	Rp 1.686.185.079.936	17,34
6	Kab. Brebes	2017	Rp 523.660.773.732	Rp 1.754.591.623.619	Rp 347.028.764.100	Rp 1.986.244.522.712	26,36
		2016	Rp 339.156.063.168	Rp 1.747.009.661.841	Rp 294.858.565.215	Rp 1.938.319.966.246	17,50

7	Kab. Cilacap	2017	Rp 648.091.381.096	Rp 1.874.953.083.082	Rp 446.130.553.962	Rp 1.973.052.856.082	32,85
		2016	Rp 428.598.349.897	Rp 1.941.145.933.885	Rp 358.196.543.872	Rp 2.009.215.450.885	21,33
8	Kab. Demak	2017	Rp 309.612.407.201	Rp 1.230.548.143.827	Rp 102.099.517.638	Rp 1.649.152.355.584	18,77
		2016	Rp 287.457.500.571	Rp 1.266.900.747.202	Rp 4.774.636.599	Rp 1.660.227.785.030	17,31
9	Kab. Grobogan	2017	Rp 440.456.238.668	Rp 1.759.723.293.511	Rp 5.928.137.350	Rp 1.980.290.287.980	22,24
		2016	Rp 299.211.316.168	Rp 1.705.546.807.799	Rp 6.434.927.618	Rp 1.897.629.137.535	15,77
10	Kab. Jepara	2017	Rp 325.530.346.533	Rp 1.316.698.615.037	Rp 102.271.543.836	Rp 1.737.272.673.504	18,74
		2016	Rp 322.509.753.285	Rp 1.383.615.805.500	Rp 11.665.457.212	Rp 1.771.912.461.497	18,20
11	Kab. Karanganyar	2017	Rp 415.142.563.370	Rp 1.271.470.088.847	Rp 10.407.571.931	Rp 1.617.910.170.668	25,66
		2016	Rp 301.307.800.956	Rp 1.390.153.333.367	Rp 2.724.767.985	Rp 1.708.302.496.239	17,64
12	Kab. Kebumen	2017	Rp 443.608.862.461	Rp 1.712.419.381.173	Rp 5.214.000.000	Rp 2.264.290.535.216	19,59
		2016	Rp 291.016.321.703	Rp 1.779.771.732.786	Rp 3.030.221.000	Rp 2.312.163.281.331	12,59
13	Kab. Kendal	2017	Rp 404.978.613.972	Rp 1.258.083.866.285	Rp 216.642.465.672	Rp 1.425.933.966.452	28,40
		2016	Rp 265.074.406.548	Rp 1.263.993.235.657	Rp 170.623.748.005	Rp 1.453.029.939.288	18,24
14	Kab. Klaten	2017	Rp 371.718.439.306	Rp 1.624.715.625.119	Rp 312.030.186.091	Rp 1.897.766.670.520	19,59
		2016	Rp 224.197.408.481	Rp 1.573.615.108.481	Rp 243.866.425.000	Rp 1.790.540.797.124	12,52
15	Kab. Kudus	2017	Rp 366.031.203.778	Rp 1.310.924.033.469	Rp 8.388.252.000	Rp 1.608.793.622.469	22,75
		2016	Rp 279.239.106.717	Rp 1.290.967.072.066	Rp 10.322.044.000	Rp 1.591.438.820.067	17,55

16	Kab. Magelang	2017	Rp 403.561.238.310	Rp 1.161.979.715.539	Rp 3.801.511.675	Rp 1.863.973.265.873	21,65
		2016	Rp 288.485.678.128	Rp 1.213.326.731.419	Rp 1.843.163.661	Rp 1.745.981.247.639	16,52
17	Kab. Pati	2017	Rp 449.821.345.800	Rp 1.689.030.336.220	Rp 7.734.814.064	Rp 2.311.686.783.608	19,46
		2016	Rp 314.921.084.791	Rp 1.579.434.897.397	Rp 19.632.814.074	Rp 2.110.509.791.068	14,92
18	Kab. Pekalongan	2017	Rp 305.394.299.061	Rp 1.282.878.563.801	Rp 22.400.805.814	Rp 1.740.112.746.919	17,55
		2016	Rp 310.572.581.552	Rp 1.182.370.555.011	Rp 2.550.859.200	Rp 1.474.228.233.821	21,07
19	Kab. Pemalang	2017	Rp 425.893.266.850	Rp 1.554.319.330.524	Rp 9.000.000.000	Rp 1.918.137.008.107	22,20
		2016	Rp 275.458.054.016	Rp 1.507.813.090.093	Rp 9.048.077.840	Rp 1.828.008.148.518	15,07
20	Kab. Purbalingga	2017	Rp 355.859.003.583	Rp 1.242.607.095.713	Rp 6.531.616.879	Rp 1.595.604.276.785	22,30
		2016	Rp 251.816.668.602	Rp 1.177.113.338.860	Rp 8.684.765.687	Rp 1.485.734.265.398	16,95
21	Kab. Purworejo	2017	Rp 298.606.494.653	Rp 1.207.260.306.714	Rp 73.321.466.245	Rp 1.742.879.831.256	17,13
		2016	Rp 255.599.240.424	Rp 1.315.706.156.856	Rp 101.122.050.000	Rp 1.712.279.552.150	14,93
22	Kab. Rembang	2017	Rp 300.319.284.807	Rp 927.645.131.515	Rp 1.711.800.674	Rp 1.420.221.823.549	21,15
		2016	Rp 234.168.365.751	Rp 935.943.695.312	Rp 1.488.856.904	Rp 1.329.211.617.301	17,62
23	Kab. Semarang	2017	Rp 417.417.843.831	Rp 1.283.938.368.800	Rp 260.272.153.000	Rp 1.457.537.863.600	28,64
		2016	Rp 318.536.051.176	Rp 1.325.779.762.120	Rp 175.206.438.999	Rp 1.484.395.526.953	21,46
24	Kab. Sragen	2017	Rp 404.569.404.722	Rp 1.401.311.726.811	Rp 7.333.549.877	Rp 1.775.129.732.297	22,79
		2016	Rp 297.176.332.577	Rp 1.442.580.724.671	Rp 8.609.085.260	Rp 1.786.973.725.071	16,63

25	Kab. Sukoharjo	2017	Rp 464.567.409.857	Rp 1.217.877.693.551	Rp 10.028.344.700	Rp 1.580.975.279.110	29,38
		2016	Rp 363.163.428.162	Rp 1.246.954.769.893	Rp 47.965.407.409	Rp 1.520.767.740.253	23,88
26	Kab. Tegal	2017	Rp 375.531.165.351	Rp 1.505.671.807.702	Rp 153.666.800.582	Rp 1.921.568.586.197	19,54
		2016	Rp 316.051.189.734	Rp 1.493.483.951.400	Rp 9.507.387.780	Rp 1.835.602.482.074	17,22
27	Kab. Temanggung	2017	Rp 308.466.748.340	Rp 1.077.448.076.741	Rp 1.485.396.240	Rp 1.469.898.249.741	20,99
		2016	Rp 281.328.148.970	Rp 1.062.555.838.091	Rp 2.060.684.299	Rp 1.395.299.245.901	20,16
28	Kab. Wonogiri	2017	Rp 333.840.434.905	Rp 1.520.105.622.888	Rp 3.602.903.890	Rp 1.980.535.317.888	16,86
		2016	Rp 218.604.854.595	Rp 1.470.168.336.258	Rp 54.111.183.650	Rp 1.762.340.497.120	12,40
29	Kab. Wonosobo	2017	Rp 228.017.473.938	Rp 1.133.217.018.646	Rp 330.872.846.776	Rp 1.270.400.013.646	17,95
		2016	Rp 199.894.767.510	Rp 1.079.170.500.015	Rp 217.202.858.000	Rp 1.158.504.208.170	17,25
30	Kota Magelang	2017	Rp 233.557.714.356	Rp 553.115.007.612	Rp 24.256.845.452	Rp 651.711.303.112	35,84
		2016	Rp 220.315.848.702	Rp 567.636.707.545	Rp 764.397.699	Rp 618.962.380.124	35,59
31	Kota Pekalongan	2017	Rp 192.002.871.181	Rp 586.158.869.314	Rp 27.216.854.000	Rp 696.700.652.314	27,56
		2016	Rp 178.604.460.870	Rp 598.621.163.830	Rp 25.546.184.000	Rp 653.492.340.909	27,33
32	Kota Salatiga	2017	Rp 220.243.361.132	Rp 593.098.550.929	Rp 270.000.000	Rp 662.232.720.979	33,26
		2016	Rp 203.768.652.017	Rp 569.849.837.883	Rp -	Rp 676.015.537.245	30,14
33	Kota Semarang	2017	Rp 1.791.886.378.674	Rp 1.640.978.289.914	Rp -	Rp 2.172.687.928.910	82,47
		2016	Rp 1.491.645.900.065	Rp 1.644.277.729.716	Rp 539.326.752.000	Rp 2.072.179.143.418	71,98

34	Kota Surakarta	2017	Rp 527.544.224.971	Rp 1.048.161.106.387	Rp 2.709.000.000	Rp 1.273.667.576.937	41,42
		2016	Rp 425.502.779.064	Rp 1.103.862.166.264	Rp 1.443.754.749	Rp 1.276.057.314.182	33,35
35	Kota Tegal	2017	Rp 306.830.656.135	Rp 644.940.136.542	Rp -	Rp 717.935.282.142	42,74
		2016	Rp 287.343.889.954	Rp 688.199.236.193	Rp 501.367.000	Rp 763.276.209.051	37,65

Lampiran 3

Persentase PAD dan Dana Perimbangan

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Daerah	PAD %	Dana Perimbangan %
1	Kab. Banjarnegara	2016	Rp 221.048.387.512	Rp 1.264.069.069.612	Rp 1.836.015.079.137	12,04	68,85
		2015	Rp 180.561.068.549	Rp 1.023.677.501.207	Rp 1.693.503.657.927	10,66	60,45
2	Kab. Banyumas	2016	Rp 541.418.386.912	Rp 1.869.097.347.790	Rp 2.852.968.390.191	18,98	65,51
		2015	Rp 502.281.349.460	Rp 1.411.687.077.480	Rp 2.654.284.992.375	18,92	53,19
3	Kab. Batang	2016	Rp 209.957.559.449	Rp 1.031.465.973.389	Rp 1.498.614.094.093	14,01	68,83
		2015	Rp 179.721.273.968	Rp 814.899.907.343	Rp 1.396.266.245.121	12,87	58,36
4	Kab. Blora	2016	Rp 171.277.522.706	Rp 1.331.611.361.558	Rp 1.858.187.916.237	9,22	71,66
		2015	Rp 156.402.924.037	Rp 1.019.665.153.124	Rp 1.648.791.900.900	9,49	61,84
5	Kab. Boyolali	2016	Rp 292.310.032.226	Rp 1.358.444.509.320	Rp 1.993.495.112.162	14,66	68,14
		2015	Rp 260.633.637.928	Rp 1.092.341.267.915	Rp 1.937.150.203.967	13,45	56,39
6	Kab. Brebes	2016	Rp 339.156.063.168	Rp 1.747.009.661.841	Rp 2.572.334.594.629	13,18	67,92
		2015	Rp 301.953.709.818	Rp 1.387.121.910.800	Rp 2.417.210.235.716	12,49	57,39

7	Kab. Cilacap	2016	Rp 428.598.349.897	Rp 1.941.145.933.885	Rp 2.796.010.344.654	15,33	69,43
		2015	Rp 409.845.660.919	Rp 1.562.967.743.187	Rp 2.737.224.737.990	14,97	57,10
8	Kab. Demak	2016	Rp 287.457.500.571	Rp 1.266.900.747.202	Rp 1.952.459.922.200	14,72	64,89
		2015	Rp 254.324.487.512	Rp 975.938.125.922	Rp 1.786.987.656.752	14,23	54,61
9	Kab. Grobogan	2016	Rp 299.211.316.168	Rp 1.705.546.807.799	Rp 2.203.275.381.321	13,58	77,41
		2015	Rp 272.718.439.175	Rp 1.186.214.542.310	Rp 2.017.588.934.756	13,52	58,79
10	Kab. Jepara	2016	Rp 322.509.753.285	Rp 1.383.615.805.500	Rp 2.106.087.671.994	15,31	65,70
		2015	Rp 270.251.582.727	Rp 1.105.250.447.896	Rp 1.930.958.695.918	14,00	57,24
11	Kab. Karanganyar	2016	Rp 301.307.800.956	Rp 1.390.153.333.367	Rp 2.012.335.065.180	14,97	69,08
		2015	Rp 255.445.549.750	Rp 1.031.780.509.616	Rp 1.834.209.380.841	13,93	56,25
12	Kab. Kebumen	2016	Rp 291.016.321.703	Rp 1.779.771.732.786	Rp 2.606.209.824.034	11,17	68,29
		2015	Rp 245.159.255.421	Rp 1.343.315.952.370	Rp 2.326.188.256.641	10,54	57,75
13	Kab. Kendal	2016	Rp 265.074.406.548	Rp 1.263.993.235.657	Rp 1.888.728.093.841	14,03	66,92
		2015	Rp 239.564.403.981	Rp 996.572.170.245	Rp 1.720.521.350.832	13,92	57,92
14	Kab. Klaten	2016	Rp 224.197.408.481	Rp 1.573.615.108.481	Rp 2.258.604.630.605	9,93	69,67
		2015	Rp 190.622.670.128	Rp 1.279.990.558.283	Rp 2.177.820.724.857	8,75	58,77
15	Kab. Kudus	2016	Rp 279.239.106.717	Rp 1.290.967.072.066	Rp 1.880.999.970.784	14,85	68,63
		2015	Rp 255.284.092.548	Rp 1.033.505.128.258	Rp 1.755.769.420.301	14,54	58,86

16	Kab. Magelang	2016	Rp 288.485.678.128	Rp 1.213.326.731.419	Rp 2.036.310.089.428	14,17	59,58
		2015	Rp 261.569.091.783	Rp 1.080.097.852.660	Rp 1.945.955.251.171	13,44	55,50
17	Kab. Pati	2016	Rp 314.921.084.791	Rp 1.579.434.897.397	Rp 2.445.063.689.933	12,88	64,60
		2015	Rp 310.063.640.827	Rp 1.214.974.988.666	Rp 2.181.691.961.101	14,21	55,69
18	Kab. Pekalongan	2016	Rp 310.572.581.552	Rp 1.182.370.555.011	Rp 1.787.351.674.573	17,38	66,15
		2015	Rp 251.558.970.834	Rp 978.154.337.307	Rp 1.697.594.551.515	14,82	57,62
19	Kab. Pemasang	2016	Rp 275.458.054.016	Rp 1.507.813.090.093	Rp 2.112.514.280.374	13,04	71,38
		2015	Rp 230.435.212.865	Rp 1.201.017.714.717	Rp 1.966.423.490.803	11,72	61,08
20	Kab. Purbalingga	2016	Rp 251.816.668.602	Rp 1.177.113.338.860	Rp 1.746.235.699.687	14,42	67,41
		2015	Rp 215.622.047.787	Rp 901.365.883.755	Rp 1.567.587.735.546	13,76	57,50
21	Kab. Purworejo	2016	Rp 255.599.240.424	Rp 1.315.706.156.856	Rp 2.069.000.842.574	12,35	63,59
		2015	Rp 233.934.134.286	Rp 986.541.786.903	Rp 1.842.491.063.926	12,70	53,54
22	Kab. Rembang	2016	Rp 234.168.365.751	Rp 935.943.695.312	Rp 1.564.868.839.956	14,96	59,81
		2015	Rp 193.122.759.857	Rp 852.722.349.235	Rp 1.408.950.534.486	13,71	60,52
23	Kab. Semarang	2016	Rp 318.536.051.176	Rp 1.325.779.762.120	Rp 1.978.138.017.128	16,10	67,02
		2015	Rp 278.851.900.617	Rp 952.250.967.517	Rp 1.677.158.224.329	16,63	56,78
24	Kab. Sragen	2016	Rp 297.176.332.577	Rp 1.442.580.724.671	Rp 2.092.759.142.908	14,20	68,93
		2015	Rp 267.711.820.479	Rp 1.154.055.980.941	Rp 2.024.057.424.890	13,23	57,02

25	Kab. Sukoharjo	2016	Rp 363.163.428.162	Rp 1.246.954.769.893	Rp 1.931.896.575.824	18,80	64,55
		2015	Rp 313.947.492.011	Rp 944.640.592.926	Rp 1.784.106.364.462	17,60	52,95
26	Kab. Tegal	2016	Rp 316.051.189.734	Rp 1.493.483.951.400	Rp 2.161.161.059.588	14,62	69,11
		2015	Rp 304.000.970.135	Rp 1.186.593.271.696	Rp 2.097.095.623.983	14,50	56,58
27	Kab. Temanggung	2016	Rp 281.328.148.970	Rp 1.062.555.838.091	Rp 1.678.688.079.170	16,76	63,30
		2015	Rp 212.498.139.929	Rp 849.969.443.934	Rp 1.469.482.958.105	14,46	57,84
28	Kab. Wonogiri	2016	Rp 218.604.854.595	Rp 1.470.168.336.258	Rp 2.035.056.535.365	10,74	72,24
		2015	Rp 211.208.601.200	Rp 1.146.100.682.063	Rp 1.963.704.538.729	10,76	58,36
29	Kab. Wonosobo	2016	Rp 199.894.767.510	Rp 1.079.170.500.015	Rp 1.575.601.833.680	12,69	68,49
		2015	Rp 182.607.628.797	Rp 836.382.532.154	Rp 1.432.159.651.029	12,75	58,40
30	Kota Magelang	2016	Rp 220.315.848.702	Rp 567.636.707.545	Rp 840.042.626.525	26,23	67,57
		2015	Rp 186.677.410.081	Rp 462.804.716.465	Rp 781.335.799.509	23,89	59,23
31	Kota Pekalongan	2016	Rp 178.604.460.870	Rp 598.621.163.830	Rp 857.642.985.779	20,83	69,80
		2015	Rp 152.044.596.332	Rp 491.178.295.665	Rp 809.733.612.473	18,78	60,66
32	Kota Salatiga	2016	Rp 203.768.652.017	Rp 569.849.837.883	Rp 676.015.537.245	30,14	84,30
		2015	Rp 167.010.555.173	Rp 455.982.623.940	Rp 750.581.558.962	22,25	60,75
33	Kota Semarang	2016	Rp 1.491.645.900.065	Rp 1.644.277.729.716	Rp 4.103.151.795.483	36,35	40,07
		2015	Rp 1.201.581.778.459	Rp 1.270.371.271.674	Rp 3.347.160.206.438	35,90	37,95

34	Kota Surakarta	2016	Rp 425.502.779.064	Rp 1.103.862.166.264	Rp 1.703.003.847.995	24,99	64,82
		2015	Rp 372.798.426.790	Rp 755.728.419.465	Rp 1.568.482.686.616	23,77	48,18
35	Kota Tegal	2016	Rp 287.343.889.954	Rp 688.199.236.193	Rp 1.051.121.466.005	27,34	65,47
		2015	Rp 271.601.407.419	Rp 500.849.967.265	Rp 947.468.621.453	28,67	52,86

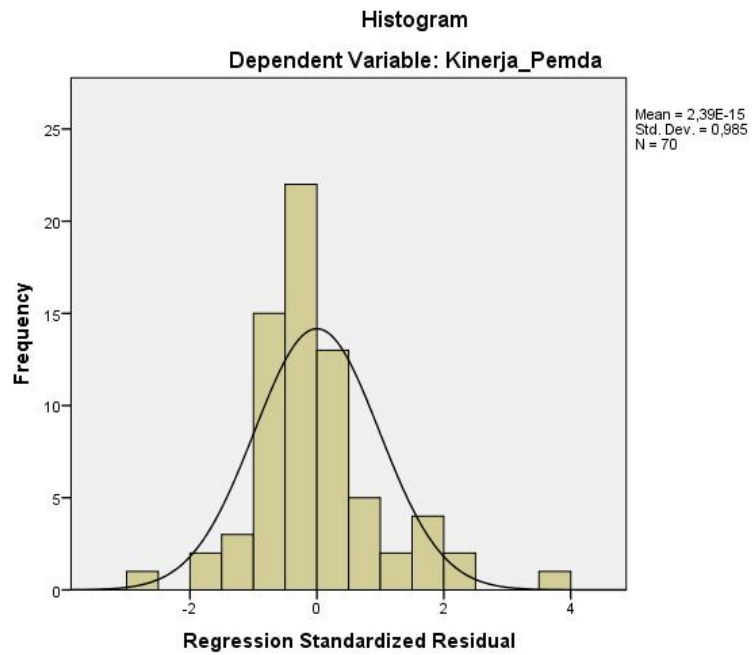
Lampiran 4**Analisis Statistik Deskriptif****Tabel 4.1****Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	70	8,75	36,35	15,9829	5,70879
Dana_Perimbangan	70	37,95	84,30	61,9006	7,55528
Kinerja_Pemda	70	11,28	82,47	23,2907	11,61799
Valid N (listwise)	70				

Lampiran 5

Uji Asumsi Klasik

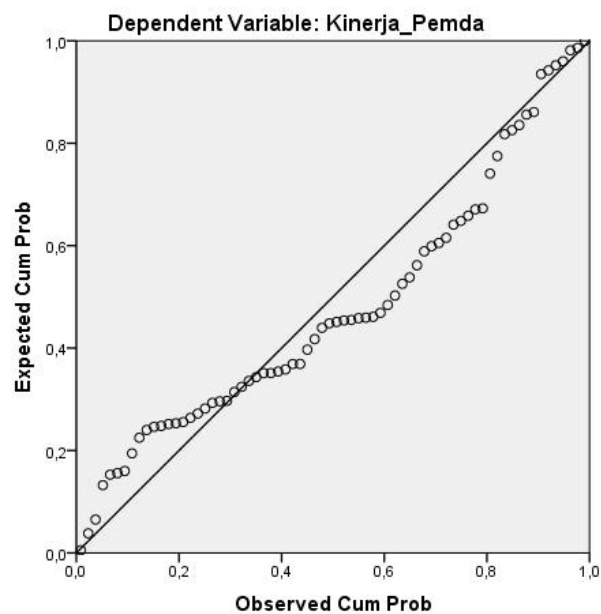
Grafik 4.1
Grafik Histogram



Grafik 4.2

Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Tabel 4.2
Uji Kolmogorov-Smirnov

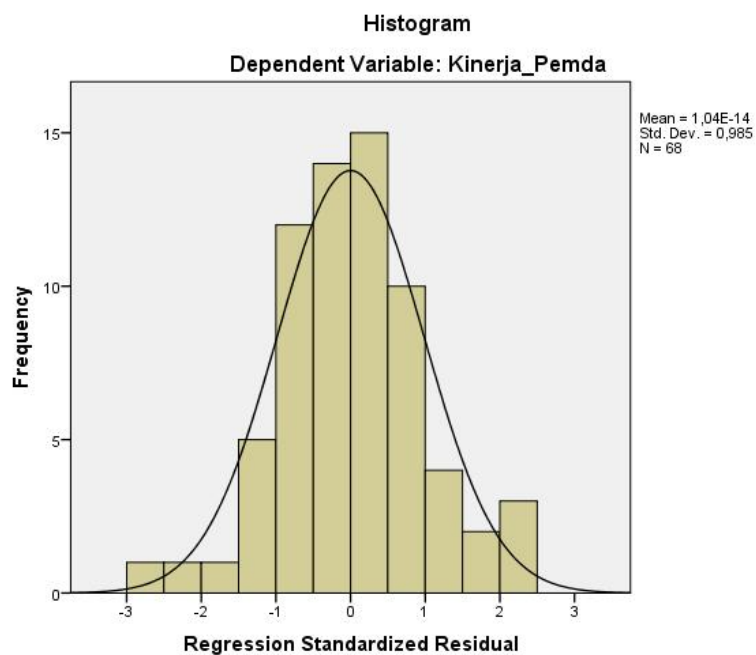
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,10765919
Most Extreme Differences	Absolute	,132
	Positive	,132
	Negative	-,108
Test Statistic		,132
Asymp. Sig. (2-tailed)		,004 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

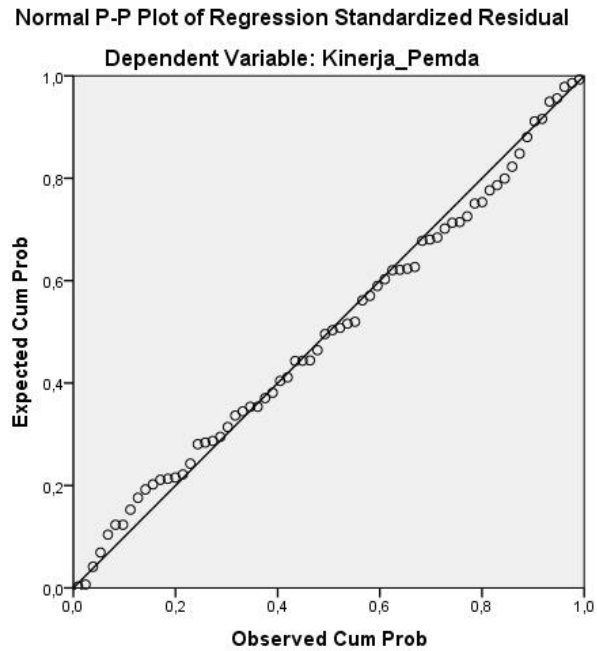
c. Lilliefors Significance Correction.

Grafik 4.3
Grafik Histogram



Grafik 4.4

Normal Probability Plot



Tabel 4.3

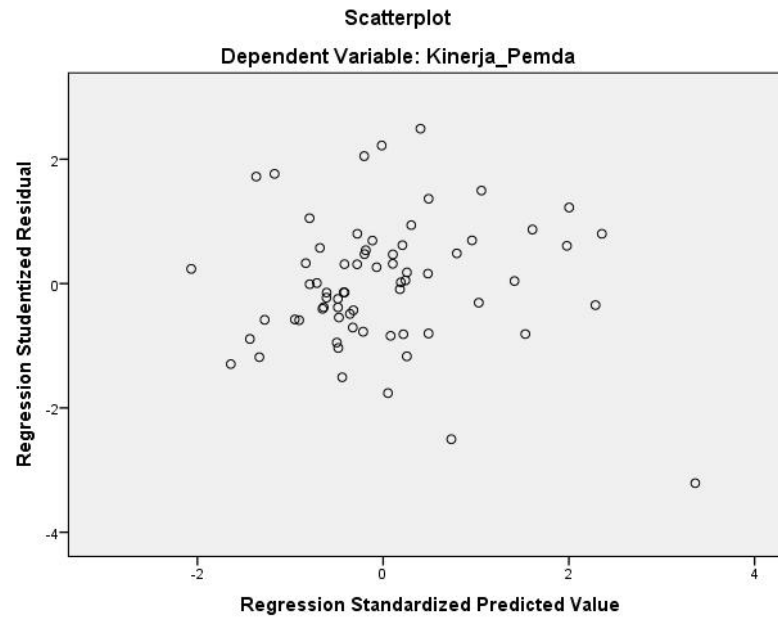
Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14272059
Most Extreme Differences	Absolute	,056
	Positive	,052
	Negative	-,056
Test Statistic		,056
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Grafik 4.5
Grafik Scatterplot



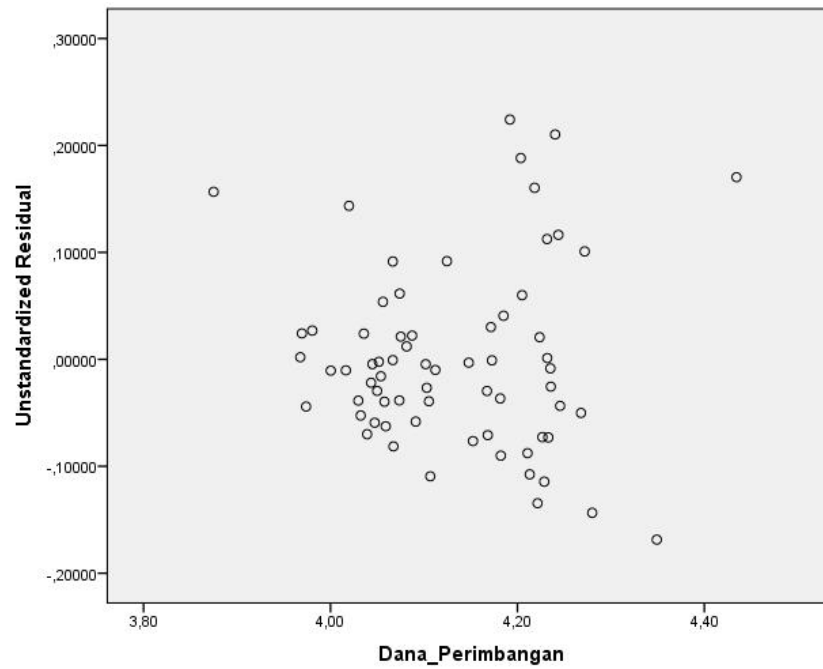
Tabel 4.4
Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,319	,437		-3,018	,004
	PAD	,036	,040	,104	,902	,371
	Dana_Perimbangan	,322	,102	,362	3,150	,002

a. Dependent Variable: AbsUT

Grafik 4.6
Scatterplot



Tabel 4.5
Uji Glejser

Coefficients^{a,b}

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	X1	,468	1,435	,154	,326	,745
	X2	,621	,347	,842	1,786	,079

a. Dependent Variable: Y_KP

b. Linear Regression through the Origin

Tabel 4.6
Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2,283	,734		-3,109	,003		
	PAD	,946	,067	,848	14,208	,000	1,000	1,000
	Dana_Perimbangan	,669	,172	,232	3,891	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemda

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	2,008

a. Predictors: (Constant), Dana_Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja_Pemda

Lampiran 6

Uji Analisis Regresi

Tabel 4.8

Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,283	,734		-3,109	,003
	PAD	,946	,067	,848	14,208	,000
	Dana_Perimbangan	,669	,172	,232	3,891	,000

Lampiran 7

Uji Hipotesis

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 ^a	,769	,762	,14490

a. Predictors: (Constant), Dana_Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja_Pemda

Tabel 4.10

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,534	2	2,267	107,966	,000 ^b
	Residual	1,365	65	,021		
	Total	5,898	67			

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemda

b. Predictors: (Constant), Dana_Perimbangan, PAD

Tabel 4.11

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,283	,734		-3,109	,003
	PAD	,946	,067	,848	14,208	,000
	Dana_Perimbangan	,669	,172	,232	3,891	,000

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemda

Lampiran 8



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**
Jl. Perintis Kemerdekaan No.175 KM 14 Banyumanik Semarang
Telp. (024) 8860826, Fax.(024) 8660884

Nomor : 04 /S/XVIII.SMG.1/01/2019
Perihal : Jawaban Izin Penelitian

07 Januari 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Memperhatikan surat Nomor B-3520/Un.10.5/D1/TL.00/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Izin Penelitian untuk:

Nama : Noor Farieda Awwaliyah
NIM : 1505046036
Program Studi/Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : "*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2015-2017)*"

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat menyetujui untuk memberikan izin pelaksanaan penelitian yang diminta, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membuat pernyataan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan peraturan/hukum yang berlaku dan pernyataan hasil karya ilmiah yang sudah selesai diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Masa berlaku jawaban atas izin penelitian ini selama tiga bulan sejak terbitnya surat ini. Jika pelaksanaan penelitian belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan surat perpanjangan waktu dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,**

Hery Subowo S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA
NIP 197105071991031002

Lampiran 9**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Noor Farieda Awwaliyah

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 06 November 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Kp. Saribaru RT 01 RW 06 Desa Krajan Kulon,
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal

No. HP : 089654308411

E-mail : fariedanoor@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK (2002-2003) : TK Trisula
2. SD (2003-2009) : SD N 2 Sarirejo
3. SMP (2009-2012) : SMP N 1 Brangsong
4. SMA (2012-2015) : SMK N 1 Kendal
5. S1 (2015-2019) : UIN Walisongo Semarang